

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin dan Anindya Saraswati Ardiwinata, 2024, Hukum Pengawasan, Bandung: Remaja Rosdakarya PT.
- Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: Rajawali Pers.
- Ahmadimiru, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia.
- Bagir Manan, 1995, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Jakarta. Dalam Andrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht, 2016, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta Ichtiar. Dalam Andrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Heliarta, 2010, Pembangunan Nasional. Semarang: ALPRIN.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, mengutip Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika.
- HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung.
- Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998).
- Sahya Anggara, 2019, Ilmu Administrasi Negara, Bandung: Pustaka Setia.
- Toman Sony Tambungan dan Wilson R.G. Tambunan, Hukum Bisnis, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana: 2019.
- Yana Rimbawati Gushanty, 2020, Hukum Perijinan, Surabaya: UBHARA Press.
- Yuda Puang, 2015, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, Yogyakarta: Deepublish.
- Manajemen Perilaku Organisasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group



Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Skripsi

Andi Ai-Amri Yahya, 2020, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Prasetio Rizki Sadhewa, 2022, *Mekanisme Penindakan Cafe Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi Di Polsek Air Batu Kisaran Kabupaten Asahan Sumut)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal

Diah Ayu Saputri, 2021, *Penyalagunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan*, Volume 2 Nomor 2, Universitas Islam Kadiri.

Fuji Puspita Rahayu, Enos Paselle, dan Thalita Rifda Khaerani, 2021, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Publik, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Mohammad Haidar Mustaghfiri, Priyanto Susiloadi, 2021, *Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta*, Jurnal Wacana Publik, Volume 1 Nomor 1, Universitas Sebelas Maret.

Ni Made Mujarti, I Made Wahyu Chandra Satriana, dan A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, 2021, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Surat Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Volume 18 Nomor 1, Universitas Dwijendra.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

Peraturan Perundang-undangan



Jamhir, 2019, *Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*, Jurnal Justisia, Volume 3 Nomor 1.

Soepeno, Muhammad Hero Soepeno, dan Victor Demsi Kasenda, 2024, *Hubungan Tingkat Kepatuhan Pemilik Usaha Dengan Kejadian Pelanggaran Perdagangan Dan Perlindungan Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume 14 Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi.

Siti Marwiyah, Veronica Sri Astuti dan Hikmah Rahmadniati Primania, 2024, *Hubungan Program Online Single Submission (OSS) Di DPMTSP Terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo*, Jurnal Niara, Volume 17 Nomor 2, Universitas Panca Marga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Wahyu Adi Mudiparwanto, 2022, Pengenalan Pengurusan Izin Usaha Perusahaan Perseorangan Dan Usaha Kecil Menengah Melalui Online Single Submission, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

Website

bandaacehkota.go.id, Kegiatan Pengawasan Penanaman, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, pukul 09:25, <https://dpmtsp.bandaacehkota.go.id/kegiatan-pengawasan-penanaman-modal/>

dpmtsp.rembangkab.go.id, Mudahnya Perizinan Pentingnya Pengawasan, diakses pada tanggal 13 Maret 2025, pukul 09:55, <https://dpmtsp.rembangkab.go.id/mudahnya-perizinan-pentingnya-pengawasan/>

OSS, diakses pada tanggal 22 November 2024, "Mekanisme Pengawasan" https://oss.go.id/informasi/mechanismepengawasan?tab=3&sub_tab=null

Rania Al-Syam, 2023, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, "Satpol PP Makassar Segel Kafe Arobi Tak Sesuai Izin, Alat DJ Disita", <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7086406/satpol-pp-makassar-segel-kafe-arobi-tak-sesuai-izin-alat-dj-disita/amp>

Ridwan Lallo, 2023, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, "Langgar Izin Usaha, Pemkot Makassar Segel Kafe Arobi", <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/12/12/langgar-izin-usaha-pemkot-makassar-segel-kafe-arobi/amp/>

Sahrul Alim, 2024, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, "Aparat Razia Kafe The Sultan Makassar Gegara Sediakan DJ Tanpa Izin Diskotek", <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7373301/aparat-razia-kafe-the-sultan-makassar-gegara-sediakan-dj-tanpa-izin-diskotek>

Saldy Irawan, 2024, diakses pada tanggal 21 Juli 2024, "Berawal dari Temuan Polisi, Pemkot Makassar Tutup Kafe The Sultan", <https://makassar.tribunnews.com/amp/2024/06/09/berawal-dari-temuan-polisi-pemkot-makassar-tutup-kafe-the-sultan>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Firman Wahab, Kepala Bidang Kebijakan Advokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Makassar, pada Tanggal 14 Oktober 2024

Wawancara dengan Bapak Safaruddin, SS, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi & Industri Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Makassar, pada Tanggal 1 Oktober 2024

Wawancara dengan Asisten Cafe Kopi Arobi, pada Tanggal 10 Januari 2025



1 Asisten Cafe D'Sultan Pool and Eatery, pada Tanggal 10 Januari 2025